

## TAJUK RENCANA

### Kontestasi Pilpres Kian Dinamis

**TEKA-TEKI** ke mana Partai Golkar dan PAN akan berlabuh dalam mengukung calon presiden terjawab sudah. Bersama Gerindra-PKB, Partai Golkar dan PAN bertekad mengukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Empat partai besar ini menekan kontrak kerja sama politik dan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Perubahan untuk Persatuan yang terdiri atas Partai Nasdem, PKS dan Demokrat bertekad mengukung Anies Baswedan sebagai bakal capres, sedang siapa bakal calon wakil presidennya belum diumumkan. Sepanjang koalisi ini kokoh, tidak tergoak untuk 'hijrah' ke koalisi lainnya, kita yakin akan ada tiga pasang kontestan yang akan berlaga di ajang Pilpres 2024.

Dari tiga koalisi besar itu, hingga sekarang belum ada yang secara resmi mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Semua masih dalam tahap penjajakan, meski sejumlah nama telah disebut sebagai pendamping bakal capres. Agaknya inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi di masyarakat, karena sarat dengan berbagai kepentingan, entah itu kepentingan politik maupun bisnis.

Secara resmi, masa kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan KPU memang belum tiba, namun secara substansial kampanye yang dibungkus safari politik sudah intens dilakukan para kandidat. Kita hanya mengingatkan agar para bakal calon untuk tidak melupakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara negara. Tentu harapannya jangan memanfaatkan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye.

Pengabdian kepada rakyat belum usai, sehingga tugas penting itu harus dituntaskan terlebih dulu. Pada akhirnya, rakyat pasti akan memilih yang terbaik, menurut versi mereka. Barangkali inilah makna kebebasan dalam memilih, termasuk memilih pemimpin, yakni dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kita akan menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira, sebagai pesta rakyat guna mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. □-d

Dengan bergabungnya partai tersebut ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), kontestasi Pilpres 2024 bakal dinamis. Selama ini Golkar dan PAN masih menimbang-nimbang untuk bergabung dengan koalisi mana, hingga bikin publik penasaran. Seperti diketahui, empat partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Meski pada Pilpres 2014 dan 2019 ia menjadi lawan Jokowi, tetapi ia tak malu ketika kini bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KR 14/8).

Itulah politik, berkembang sangat dinamis. Saat diminta tanggapannya atas bergabungnya Golkar dan PAN dalam KKIR, bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo menyatakan menghormati pilihan politik parpol tersebut. Menurutnya, ini merupakan dinamika politik yang harus dihormati.

Pemilu memang masih beberapa bulan lagi, namun suhunya mulai menghangat, untuk tidak mengatakan memanas. Polarisasi dukungan ke capres mulai terbentuk. Paling tidak ada tiga bakal capres yang akan bertaring di ajang Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dengan catatan, koalisi parpol pengukung bakal capres ini tidak goyah.

Seperti diketahui, Koalisi

# Sudah Merdekakah Demokrasi Kita?

## Alimansyah

**MENJELANG** 78 tahun Kemerdekaan Indonesia, nasib demokrasi bangsa ini masih tak seberkibar bendera Merah Putih di depan rumah warga. Empat tahun yang lalu Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 16-21/8/2020) mengatakan sebagian besar dari 38 elite yang disurvei menilai kondisi demokrasi Indonesia menurun. 44,7% responden menilai demokrasi sedang merosot. Bahkan 28,9% responden menilai Indonesia terancam di *tubir otoritarianisme*. Penyebab kemunduran demokrasi menurut survei dibagi dalam empat kelompok: struktural, institusional, kultural dan agensi.

Kini cerita tersebut juga tak kunjung sirna. Indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) pada LP3ES awal Februari 2023 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Meski serupa dengan skor di tahun 2021, namun peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54. Maka Indonesia pun masih masuk kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*). Sedangkan menurut Freedom House Indonesia berada di peringkat 59 pada 2022 sekaligus menggolongkan status demokrasi Indonesia sebagai *partly free* (belum sepenuhnya demokratis).

### Korupsi Aktor Politik

Salah satu variabel penting untuk melihat merdekakah demokrasi kita adalah tingkat korupsi yang terus menggerogoti bangunan demokrasi. Studi Merkel (2004) misalnya menunjukkan bagaimana penurunan kepuasan berdemokrasi di Eropa terjadi pada negara yang tingkat korupsi dan stagnasi ekonominya tinggi.

Hal tersebut menunjukkan keseriusan pengendalian laju korupsi menjadi salah satu obat penawar bagi sakitnya demokrasi. Dalam laporan Transparency International Indonesia (Januari 2023), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 menurun dari angka 38



KR-JOKO SANTOSO

Berdasarkan data di situs kpk.go.id, sejak tahun 2004 (3/1/2022), tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota yang ditindak KPK. Sedangkan menurut ICW tak kurang dari 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi sepanjang tahun 2010 hingga Juni 2018. Lebih jauh kerugian momentum elektoral yang sudah dikorbankan rakyat di altar pemilu, dengan biaya politik yang mahal dan menghasilkan kebijakan yang tidak pro rakyat.

### Tanggungjawab Parpol

Parpol yang memproduksi elite-elite rasuah harusnya ikut bertanggung

jawab atas kesuraman tersebut. Nyatanya, parpollah yang memperuncyam mesin dan sistem kerja politiknya lewat praktek politik uang, baik dalam proses kaderisasi maupun pencalonan dalam kontestasi politik. Parpol bahkan terus membajak demokrasi rakyat dengan kembali memberikan tiket kepada para eks koruptor untuk mendaftar pada pemilihan calon legislatif maupun kepala daerah.

Lalu bagaimana ke luar dari labirin persoalan tersebut? *Pertama*, komitmen Presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi untuk memberikan ruang bagi penegakan hukum yang konsisten, tegas dan imparisial adalah keniscayaan. Ini jauh lebih penting ketimbang negara sibuk meladeni kritik publik hanya sekadar untuk menjaga citra kekuasaan di tahun politik.

*Kedua*, Para elite harus memiliki politik altruisme, sebuah rasa cinta terhadap kejujuran dan integritas dengan menghancurkan nafsu kekuasaan dan uang serta kepentingan kelompok. Untuk menegakkan kepentingan dan kemaslahatan bangsa. Jika itu dilakukan, kita yakin mentalitas korupsi yang menjajah republik lewat praktik politik yang destruktif bisa kita usir. Sehingga demokrasi kita benar-benar merdeka. □-d

\*) **Alimansyah**, Dosen Universitas Bengkulu, Mahasiswa Doktoral Manajemen & Kebijakan Publik, Fisiopol UGM

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Bagaimanakah Sosok Presiden RI 2024?

## Albertus D Soge

**BAGAIMANA** sosok Presiden RI 2024? Pertanyaan yang juga menjadi judul tulisan ini merupakan menarik. Apalagi tahun depan kita memilih presiden. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah teori Siklus Polybius.

Polybius mengembangkan teori Anacyclosis yang dikenal dengan sebutan Siklus Polybius. Menurut teori tersebut ada tiga jenis bentuk pemerintahan yang bernilai positif (monarki, aristokrasi, dan demokrasi) dan di sisi lain ada bentuk kemerosotannya (tirani, oligarki, dan okhlokrasi). 'Tiga kebaikan' dan 'tiga keburukan' tersebut saling menggantikan dalam siklus yang berkelanjutan. Urutannya: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, okhlokrasi, dan kembali ke monarki dan seterusnya.

Polybius mendiskripsikan, negara akan muncul dalam bentuk monarki di bawah kepemimpinan raja yang berpengaruh dan bijaksana (*rule by the one*). Kekuatan politik akan diteruskan secara turun-temurun kepada keturunan raja. Ketika mereka menyalahgunakan wewenang, negara menjadi tirani. Beberapa orang yang berpengaruh dan berkuasa melawan penyalahgunaan tiran, dan menggulingkan mereka. Ini melambatkan kekuasaan aristokrasi (*rule by the few*). Namun, keturunan bangsawan ini mulai menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya, seperti para tiran. Tahap ini mewakili penurunan aristokrasi dan awal dari oligarki.

Pada tahap ini terjadi evolusi politik negara, rakyat akan memutuskan untuk membawa masalah politik ke tangan mereka sendiri sehingga muncul pemerintahan demokrasi (*rule by the many*). Ketika para democrat menyalahgunakan status politik sebagaimana keturunan raja dan bangsawan, demokrasi merosot menjadi okhlokrasi. Rakyat akan menja-

di korup dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan egonya sendiri. Akhirnya, negara akan dilanda kekacauan dan muncul seorang pemimpin membawa negara kembali ke monarki.

### Di Indonesia

Siklus perubahan bentuk pemerintahan dalam teori Polybius ini juga bisa diterapkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada masa Orde Reformasi diadakan perubahan dan penghapusan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak demokratis. Sistem yang terbentuk dalam periode Orde Reformasi menjamin pemerintahan berjalan secara lebih demokratis (tahap demokrasi Siklus Polybius).

Setelah berganti empat presiden, Indonesia sekarang dipimpin Jokowi. Presiden Jokowi dihasilkan dari sistem demokrasi yang terbentuk dalam periode Orde Reformasi. Walau aturan dan sistem yang dibuat sudah lebih demokratis bisa saja ada tindakan pemerintah dan DPR yang kontroversial atau tidak mencerminkan demokrasi. Beberapa contoh revisi UU KPK, revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba), pernyataan Bambang Pacul mengenai perintah Ketua Umum untuk membahas RUU, sampai dengan pemberhentian dan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa walaupun siklus bentuk negara di Indonesia sudah mencapai tahap demokrasi, namun ada praktik-praktik kenegaraan yang menunjukkan kemerosotan demokrasi. Jika sistem dan aturan demo-

krasi yang sudah dibuat tidak disempurnakan atau bahkan tidak dipatuhi secara terus-menerus maka Indonesia akan masuk ke tahap okhlokrasi. Pada tahap ini penyelenggara negara maupun rakyat tidak lagi mematuhi aturan yang ada dan berusaha memenuhi kebutuhan ego atau kelompoknya masing-masing sehingga negara dilanda kekacauan.

Seandainya tahap okhlokrasi tercapai, kita akan membutuhkan sosok pemimpin dalam tahap monarki, yaitu sosok pemimpin yang berpengaruh dan bijaksana serta mempunyai kemampuan menjaga kesatuan dan stabilitas negara. Jika Indonesia tetap di tahap demokrasi maka pemimpin pilihan rakyat yang mempunyai sosok mempersatu bangsa dan mempunyai visi kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika yang akan menjadi Presiden. □-d

\*) **Albertus D Soge SH MSc CMed**, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45

## Pojok KR

Gabung Gerindra-PKB, Golkar dan PAN usung Prabowo.  
-- **Dinamika politik tak perlu dikhawatirkan.**

DIY masih kekurangan 12.000 alat penerangan jalan.  
-- **Sangat vital, perlu terobosan gunakan danais.**

KPU usul hukuman efek jera bagi pelaku politik uang.  
- **Praktiknya, mereka tak pernah jera.**

*Berabe*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Peringatan Kemerdekaan Tanpa Lagu Perjuangan

**MINGGU** (13/8) banyak kegiatan di kampung-kampung untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI. Suasana yang meriah dan menggembirakan tercipta dengan berbagai kegiatan dan lomba. Yang terasa berbeda halnya satu. Jika di masa-masa lalu suasana semangat juang akan muncul dengan diperdengarkan lagu-lagu perjuangan melalui menjelang dilaksanakan kegiatan. Mulai lagu Halo-jalo Bandung, Sorak-sorak Bergembira, Berkibarlah Benderaku bahkan

hingga Rayuan Pulau Kelapa. Lagu-lagu tersebut akan digemakan termasuk untuk mengiringi kegiatan lomba.

Kini yang mengiringi bukan lagu-lagu perjuangan. Namun kegiatan itu diiringi semarak lagu-lagu kontemporer: Aja Dibanding-bandingke, Rungkad, Mau mere dan sejenisnya. Sehingga kurang tampak suasana memeriang HUT Kemerdekaan. □-d

\*) **Purwanto Amd**, Berbah Sleman

## Diperlukan, KKN Program Literasi Digital

**SECARA** singkat, tujuan kuliah kerja nyata (KKN) memberdayakan masyarakat. Makna yang kompleks, dan melihat tantangannya tentu sangat berbeda dengan zaman awal dilaksanakan KKN, tahun 70-an.

Tujuan mengambil pada masyarakat itu tampaknya tidak jauh bergeser. Hanya tantangan kini tidaklah sama, mengingat sudah sekitar setengah abad KKN dilaksanakan. Karenanya, model pengabdian dengan

memahami kondisi masyarakat. Sehingga dengan adanya KKN Tematik, perlu diberikan tema literasi digital. Ini menjadi perlu. Sebab sekarang begitu meningkat penipuan siber. Sementara banyak orang hanya menggunakan HP sebagai alat telepon dan WA semata. Tanpa mengetahui adanya pelbagai hal yang bisa mengecoh bahkan menipu mereka. □-d

\*) **Kusuma MA**, Gemah Pedurangan Semarang

**Kedaulatan Rakyat**  
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.  
**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
**Wartawan:** H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.  
**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.  
**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.  
**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP